

GENEALOGI PERAN KAUM SANTRI DALAM SKETS POLITIK NASIONAL

Zaini Tamin AR
(STAI YPBWI Surabaya)

Abstrak:

Tulisan ini menarasikan tentang peran kaum santri dan pesantren yang sampai saat ini membuktikan keberhasilannya menjawab tantangan zaman. Kemampuan adaptatif pesantren atas perkembangan zaman memperkuat eksistensinya sekaligus memberikan kontribusi yakni, mensinergikan intelektual, emosional, dan spiritual, yang dapat membentuk kepribadian; sebuah faktor penting dalam integritas kepemimpinan. Di sisi lain, pesantren memiliki kemampuan untuk melangkah keluar dari budaya yang ada dan memulai proses perubahan evolusioner yang lebih adaptif. Sementara, lingkup pembahasan tulisan adalah relasi pesantren dan kepemimpinan dan peran kaum santri terhadap dunia politik Nasional. Pesantren dapat mendidik santri yang tak hanya mempunyai integritas keilmuan yang memadai tapi juga integritas moral dan etika, yang akan menjadi faktor penting ketika seorang santri kembali ke lingkungan sosialnya. Santri dan pesantren dari masa ke masa telah memberi kontribusi konkrit dalam perjalanan sejarah Republik ini, tak terkecuali dalam sosial politik. Perjuangan melawan penjajah, pembentukan NKRI, hingga terdistribusinya kaum santri dalam posisi politis di Indonesia. Kontribusi kaum santri dan pesantren yang demikian menjadi bukti bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dan masih tetap eksis hingga kini, tetapi juga merupakan entitas sosial yang memiliki pengaruh cukup kuat - sekaligus unik - dalam kehidupan sosial politik di Indonesia.

Kata Kunci: Santri, Pesantren, Politik Nasional.

A. Pendahuluan

Istilah santri berasal dari kata “shastra(i)” dari bahasa Tamil yang berarti seorang ahli buku suci (Hindu). Dalam dunia pesantren istilah santri adalah murid pesantren yang biasanya tinggal di asrama atau pondok. Hanya santri yang rumahnya dekat dengan dengan pesantren tidak demikian. Dari sumber lain, santri berarti orang baik yang suka menolong.¹ Menurut Marzuki Wahid, santri adalah seseorang yang mempunyai tiga ciri-ciri utama yaitu : 1) peduli

¹ Abu Hamid dalam H.M Yacub, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa* (Bandung: Angkasa, 1993), 65.

terhadap kewajiban *ainiyah* (*ihtimam bi al-furuḍ al-'ainiyah*), 2) menjaga hubungan yang baik dengan *al-khalīq* (*khusnu al-mu'āmalah ma'a al-khalīq*), 3) menjaga hubungan yang baik dengan sesama makhluk (*khusnu al-mu'āmalah ma'a al-khalīq*).² Lebih lanjut, Husnan Bay Fananie, menjelaskan santri adalah siswa yang tinggal di pondok pesantren yang mempelajari agama secara serius dan belajar kepada kiai.³ Hubungan antar santri sangat dekat, saling membantu meskipun berasal dari propinsi, pulau atau negara yang berbeda.

Dalam istilah lain juga diterangkan bahwa santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar dalam pesantren.⁴ Tapi dalam perkembangan selanjutnya, ada beberapa tipologi santri. Menurut para ahli santri dapat dikelompokkan beberapa bagian yaitu : (1) Santri mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantren tersebut biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memegang tanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari, mereka juga memikul tanggung jawab mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah. (1) Santri kalong, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajaran di pesantren, mereka bolak-balik (*nglajo*) dari rumahnya sendiri. Biasanya perbedaan antara pesantren besar dan pesantren kecil dapat dilihat dari komposisi santri kalong.⁵

Dalam menempa keilmuannya, seorang santri mengarungi bahtera intelektuarnya di pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mampu berdialog dan menyerap budaya lokal Nusantara. Meski kerap dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional, ternyata pesantren mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Zaman telah “memaksa” pesantren untuk berbenah, berubah dan berkembang secara dinamis.

² Marzuki Wahid dkk, *Pesantren Masa Depan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 90.

³ Husnan Bay Fananie, *Modernism in Islamic Education in Indonesia and India ; A Case Study of The Pondok Pesantren Modern Gontor and Algarh*, Thesis No Phublished, (Nedherlad: Leiden University, 1998), 112.

⁴ Haedar Putra Dauly, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 15.

⁵ Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren Setudi Tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1985), 51-52.

Dinamika pesantren dipahami Azyumardi Azra, sebagai fungsi kelembagaan yang memiliki tiga peranan pokok. *Pertama*, transmisi ilmu pengetahuan Islam. *Kedua*, pemeliharaan tradisi Islam. *Ketiga*, pembinaan calon-calon ulama. Keilmuan pesantren lebih mengutamakan penanaman ilmu dari pada pengembangan ilmu. Hal ini terlihat pada tradisi pendidikan pesantren yang cenderung mengutamakan hafalan dalam transformasi keilmuan di pesantren.⁶ Tradisi pesantren yang memiliki keterkaitan dan keakraban dengan masyarakat lingkungan diharapkan dapat menciptakan suatu proses pendidikan tinggi yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian terciptalah masyarakat belajar, sehingga ada hubungan timbal balik antar keduanya.⁷ Di sini masyarakat telah berperan serta dalam pendidikan di pesantren, sehingga pesantren dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi masyarakat untuk mencari alternatif pemecahannya.

Mengenai kepemimpinan, kepemimpinan yang efektif merupakan realisasi perpaduan bakat dan pengalaman kepemimpinan dalam situasi yang berubah-ubah karena berlangsung melalui interaksi antar sesama manusia. Kepemimpinan yang sukses itu mampu mengelola apa yang dipimpinnya, mampu mengantisipasi perubahan, mampu mengoreksi kekurangan dan kelemahan serta sanggup membawa lembaga pada tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal ini pimpinan merupakan kunci sukses bagi organisasi.⁸

Kepemimpinan dan pemimpin dibutuhkan untuk mengefisienkan setiap langkah atau kegiatan yang berarti. Hanya pemimpin-pemimpin yang bersedia mengakui bakat-bakat, kapasitas, inisiatif dan kemauan baik dari para pengikutnya (rakyat, anak buah, individu dan kelompok-kelompok individu yang di pimpin) untuk berinisiatif dan bekerja sama secara kooperatif, hanya pemimpin sedemikian inilah yang mampu menjamin kesejahteraan lahir batin masyarakat luas. Sekaligus, pemimpin macam tadi itu sanggup mempertinggi produktifitas dan efektifitas usaha bersama. Oleh karena itu, pemimpin

⁶ Azyumardi Azra, *Esai-Esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 89.

⁷ Ibid., 108.

⁸ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Rajawali, 1990), 1.

merupakan faktor kritis (*crucial factor*) yang dapat menentukan maju mundurnya suatu lembaga.⁹

Kepemimpinan ke depan dengan dinamika sosial yang semakin cepat dan terbuka, menuntut kemampuan yang lebih kreatif, inovatif dan dinamis. Pemimpin yang sekedar bergaya menunggu dan terlalu berpegang pada aturan-aturan birokratis dan berfikir secara struktural dan tidak berani melakukan inovasi untuk menyesuaikan tuntutan masyarakatnya, akan ditinggalkan oleh peminatnya. Pada masyarakat yang semakin berkembang demikian cepat dan didalamnya terjadi kompetisi secara terbuka selalu dituntut kualitas pelayanan yang berbeda dengan masyarakat sebelumnya.¹⁰

Secara sederhana, kepemimpinan (nasional, daerah, bisnis, ormas) yang ideal membutuhkan pribadi yang mempunyai kemampuan dan karakter yang baik. Kemampuan itu tidak hanya bermakna mempunyai visi yang baik, tetapi juga mempunyai kemampuan membawa visi itu menjadi kenyataan. Pemimpin itu harus mempunyai kemampuan memilih tokoh-tokoh yang juga mampu di bidang masing-masing, artinya punya visi yang baik dan mampu mewujudkan visinya.

Dalam konteks kehidupan bangsa dan negara Indonesia saat ini, masalah-masalah utama kita ialah penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi dan penegakan HAM, reformasi birokrasi yang nyata bukan hanya diatas kertas. Selain itu, perencanaan ekonomi yang tidak mengejar pertumbuhan saja, tetapi juga bagus didalam pemerataan, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Pendidikan yang selama ini kita peroleh baru menyentuh aspek kognitif belum aspek afektif dan psikomotorik. Kebijakan pembangunan ekonomi masih perlu diubah orientasinya dengan melihat kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa pemihakan terhadap rakyat kalah oleh pemihakan terhaap pengusaha.

Pemimpin nasional kita harus jenis orang yang cekatan bekerja, bukan jenis yang pandai retorika. Yang paling utama ialah karakter calon pemimpin

⁹ Ibid., 2.

¹⁰ Imam Suprayogo, *Pendidikan Berparadigma Al-Qur'an* (Malang: Aditya Media Bekerjasama Dengan UIN Malang Press, 2004), 212.

nasional. Dari sekian banyak rumusan tentang karakter, yang tidak pernah terlewatkan ialah kejujuran. Justru di dalam masalah utama ini kita mengidap kelemahan yang merata. Sulit sekali mencari pemimpin yang jujur, baik di lembaga pemerintah, perusahaan, parpol dan bahkan ormas, termasuk ormas agama. Yang perlu juga kita garis bawahi ialah sikap adil, berani dalam memperjuangkan kebenaran, sederhana, peduli terhadap orang rakyat.

Pesantren telah berjasa besar dalam menumbuhkan masyarakat swadaya dan swasembada. Penempatan pesantren sebagai pendidikan formal jalur sekolah yang dikembangkan pemerintah sebagai modernisasi pendidikan telah memudahkan ciri pesantren yang bebas, kreatif, berswadaya dan berswasembada.¹¹ Kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena adanya sentralisasi dan birokratisasi pendidikan nasional serta campur tangan yang dilakukan pemerintah.

Dalam sejarah, kepemimpinan tokoh pesantren di tingkat nasional baru mulai menonjol di era pendudukan Jepang saat Pemerintahan Militer Jepang meminta KH. Hasyim Asy'ari untuk memimpin Shumubu (semacam Kantor Urusan Agama) di Jakarta. Kiai Hasyim menerima, tetapi diwakili oleh KH.A.Wahid Hasyim. Jepang meminta Kiai Hasyim memimpin Shumubu karena memahami bahwa NU adalah organisasi Islam terbesar di Jawa. Bahkan pada Agustus 1945 pihak Jepang pernah mengutus Maruto Nitimihardjo ke Jombang untuk meminta KH. Hasyim Asy'ari menjadi Presiden RI, tetapi dia menolak dan atas saran KH.A. Wahid Hasyim, dia mendukung Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah itu, banyak santri (sebagai tokoh dari pesantren) yang berkiprah di tingkat nasional. Sebut saja, KH. Idham Chalid, Gus Dur dan Cak Nur. Puncaknya ialah saat Gus Dur terpilih menjadi Presiden.

¹¹ Abdul Munir Mul Khan, *Nalar Spiritual Pendidikan, Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam* (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2002), 180.

B. Pendidikan Kaum Santri; Fondasi Dasar Pembentukan Karakter Kepemimpinan

Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar dalam pesantren.¹² Pendidikan bagi seorang santri merupakan sistem dan cara untuk meningkatkan kualitas dan kehidupan dalam segala bidang. Pendidikan kaum santri saat ini diorientasikan pada efektifitas dan efisiensi sistem pesantren. Untuk mengikuti perkembangan zaman, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang mampu menyesuaikan dengan segala macam bentuk zaman, di mana pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan agama Islam diharapkan dapat diperoleh di pesantren. Apa pun usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pesantren di masa kini dan masa yang akan datang harus tetap pada prinsip ini. Tujuan pendidikan pesantren tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, serta menyiapkan para murid untuk hidup sederhana dan bersih hati. Selain itu, tujuan pendidikan pesantren bukanlah untuk mengejar kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan.¹³ Tujuan ini pada gilirannya akan menjadi faktor motivasi bagi para santri untuk melatih diri menjadi seorang yang ikhlas di dalam segala amal perbuatannya dan dapat berdiri sendiri tanpa menggantungkan sesuatu kecuali kepada Tuhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan pendidikan pesantren adalah mendidik manusia yang mandiri, berakhlak mulia, serta bertaqwa.

Berdasarkan tujuan pendidikan pesantren seperti di atas, maka yang paling ditekankan adalah pengembangan watak pendidikan individual. Santri dididik sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan dirinya, sehingga di pesantren dikenal prinsip-prinsip dasar belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Bila di antara para santri ada yang memiliki kecerdasan dan keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya, mereka akan diberi perhatian khusus dan

¹² Dauliy, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, 15.

¹³ *Ibid.*, 21.

selalu didorong untuk terus mengembangkan diri, serta menerima kuliah pribadi secukupnya. Para santri diperhatikan tingkah laku moralnya dan diperlakukan sebagai makhluk yang terhormat sebagai titipan Tuhan yang harus disanjung. Kepada mereka ditanamkan perasaan kewajiban dan tanggung jawab untuk melestarikan dan menyebarkan pengetahuan mereka tentang Islam kepada orang lain, serta mencurahkan segenap waktu dan tenaga untuk belajar terus menerus sepanjang hidup.¹⁴

Dalam sistem pendidikan pesantren tradisional tidak dikenal adanya kelas-kelas sebagai tingkatan atau jenjang pendidikan. Santri dalam belajar di pesantren tergantung sepenuhnya pada kemampuan pribadinya dalam menyerap ilmu pengetahuan. Semakin cerdas seseorang, maka semakin singkat ia belajar.¹⁵ Menurut tradisi pesantren, pengetahuan seorang santri diukur dari jumlah buku-buku atau kitab-kitab yang telah pernah dipelajarinya dan kepada ulama mana ia telah berguru. Jumlah kitab-kitab standar berbahasa Arab yang harus dibaca (*ketubuh muqarrarah*) telah ditentukan oleh lembaga-lembaga pesantren. Dengan demikian, dalam pesantren tradisional kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning) dijadikan mata kajian, sekaligus sebagai sarana penjenjangan kemampuan santri dalam belajar. Satuan waktu belajar tidak ditentukan oleh kurikulum atau usia, melainkan oleh selesainya kajian satu atau beberapa kitab yang ditetapkan. Pengelompokan kemampuan santri juga tidak didasarkan semata-mata kepada usia, tetapi kepada taraf kemampuan santri dalam mengkaji dan memahami kitab-kitab tersebut.¹⁶

Dalam pesantren tradisional, untuk menentukan kitab mana yang akan dikaji dan diikuti oleh seorang santri tidak secara ketat ditentukan oleh Kiai atau pesantren, melainkan justru diserahkan kepada santri itu sendiri. Hal ini karena santri yang meneruskan ke pesantren, terutama pesantren besar, dianggap telah mampu untuk mengukur kemampuannya, sehingga pesantren atau Kiai hanya membimbing tentang cara menentukan pilihan kajian. Pemilihan materi belajar

¹⁴ Ibid., 22.

¹⁵ Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai; Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng* (Malang: Kalimasyahadah Press, 1993), 37.

¹⁶ A. Wahid Zaini, "Orientasi Pondok Pesantren Tradisional Dalam Masyarakat Indonesia", dalam *Tarekat, Pesantren, dan Budaya Lokal*, ed. M. Nadim Zuhdi et. al. (Surabaya : Sunan Ampel Press, 1999), 79.

yang memberikan keleluasaan kepada santri untuk ikut mengambil peranan di dalam menentukan jenjang dan kurikulum belajarnya oleh sebagian peneliti dianggap sebagai adanya proses demokratisasi di dalam proses belajar mengajar.¹⁷

Dewasa ini, beberapa pesantren tradisional tetap bertahan dengan kedua sistem pengajaran tersebut tanpa variasi ataupun perubahan. Sedangkan sebagian yang lain telah berubah sesuai dengan perubahan zaman dan mulai menerapkan sistem pendidikan *klasikal* yang dianggap lebih efektif dan efisien. Sistem yang disebut terakhir ini mulai muncul dan berkembang di awal tahun 1930-an. Modelnya seperti sekolah pada umumnya, meskipun kurikulum dan silabusnya sangat bergantung pada Kiai, dalam arti dapat berubah-ubah sesuai dengan pertimbangan dan kebijaksanaan Kiai. Ini semua masih dalam satu pembicaraan, yaitu hanya pelajaran agama atau kitab-kitab kuning saja yang diajarkan.¹⁸

Sistem evaluasi yang berlaku di dalam pesantren tradisional biasanya tidak terlalu ketat dan mengikat, melainkan sangat memberi keleluasaan kepada santri yang bersangkutan untuk melakukan *self-evaluation* (evaluasi diri sendiri). Dalam evaluasi pengajaran ini, peranan Kiai sangat menonjol dan lebih besar pada metode *sorogan*, sementara pada metode *wetonan* para santri sangat mempunyai peranan. Biasanya titik tekan evaluasi yang dilakukan oleh Kiai dan pengurus pesantren tidak sekedar pada pengetahuan kognitif, berupa sejauh mana keberhasilan penyerapan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh santri, tetapi lebih jauh lagi pada keutuhan kepribadiannya berupa ilmu, sikap, dan tindakan “tutur kata dan perbuatan” yang terpantau dalam interaksi keseharian santri dengan Kiai. Dalam menentukan apakah seorang santri telah berhasil menyelesaikan suatu kurikulum tertentu, dengan demikian tidak sekedar dinilai dari aspek penguasaan intelektualnya, melainkan juga integritas kepribadian santri yang bersangkutan yang dinilai dari kiprah dan tingkah laku kesehariannya.¹⁹

Proses pendidikan kaum santri berlangsung selama 24 jam. Dalam pesantren tradisional, penjadwalan waktu belajar tidaklah terlalu ketat. *Timing* dan

¹⁷ Ibid., 80.

¹⁸ Ibid., 107.

¹⁹ Ibid., 80.

alokasi waktu bagi sebuah kitab yang dikaji biasanya disepakati bersama oleh Kiai dan santri sesuai dengan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan bersama. Dapat saja waktu 24 jam hanya dimanfaatkan empat atau lima jam untuk istirahat, sedangkan sisanya untuk proses belajar mengajar dan beribadah, baik secara kolektif maupun secara individual. Pendidikan pesantren sangat menekankan aspek etika dan moralitas. Proses pendidikan di sini merupakan proses pembinaan dan pengawasan tingkah laku santri yang seharusnya merupakan cerminan ilmu yang telah diperoleh. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan peneladanan langsung oleh Kiai dan pengurus sebagai kepanjangan tangan dari Kiai, mulai dari urusan ibadah sampai pada urusan keseharian santri.²⁰

Pada pesantren tradisional dikenal pula sistem pemberian ijazah, tetapi bentuknya tidak seperti yang dikenal dalam sistem modern. Ijazah di pesantren berbentuk pencantuman nama dalam suatu daftar rantai transmisi pengetahuan yang dikeluarkan oleh gurunya terhadap muridnya yang telah menyelesaikan pelajarannya dengan baik tentang suatu kitab tertentu sehingga si murid tersebut dianggap menguasai dan boleh mengajarkannya kepada orang lain. Tradisi ijazah ini hanya dikeluarkan untuk murid-murid tingkat tinggi dan hanya mengenai kitab-kitab besar dan masyhur. Para murid yang telah mencapai suatu tingkatan pengetahuan tertentu tetapi tidak dapat mencapai ke tingkat yang cukup tinggi disarankan untuk membuka pengajian, sedangkan yang memiliki ijazah biasanya dibantu mendirikan pesantren.²¹

Pesantren modern merupakan tipe pesantren yang mempunyai ciri berlainan dengan pesantren tradisional dan sering diperhadapkan secara *vis a vis* (berlawanan) dengan pesantren tradisional. Ciri pertama dari pesantren modern adalah meluasnya mata kajian yang tidak terbatas pada kitab-kitab Islam klasik saja, tetapi juga pada kitab-kitab yang termasuk baru, di samping telah masuknya ilmu-ilmu umum dan kegiatan-kegiatan lain seperti pendidikan ketrampilan dan sebagainya. Sistem pengajaran dalam pesantren modern tidak semata-mata tumbuh atas pola lama yang bersifat tradisional, tetapi juga telah dilakukan suatu

²⁰ Ibid., 81-82.

²¹ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 23.

inovasi dalam pengembangan sistem pengajaran tersebut. Sistem pengajaran yang diterapkan tersebut adalah sistem *klasikal*, sistem kursus-kursus, dan sistem pelatihan yang menekankan pada kemampuan psikomotorik.²²

Ciri kedua pesantren modern adalah hadirnya warna pengelolaan (perencanaan, koordinasi, penataan, pengawasan, dan evaluasi) yang sudah diwarnai oleh konsep-konsep pengelolaan baru, yang merupakan serapan dari konsep-konsep yang ada di luar pesantren. Pengelolaan ini juga meliputi pola pendekatan dan teknologi yang digunakan. Masuknya komputer ke dalam sistem manajemen pesantren, digunakannya metodologi pendidikan yang diserap dari ilmu pendidikan, digunakannya jasa perbankan dalam sistem pengelolaan keuangan, dan berintegrasinya sistem evaluasi pesantren ke dalam sistem evaluasi pendidikan nasional, merupakan beberapa ciri lain yang dapat disebut untuk menunjuk pada hadirnya bentuk pengelolaan pesantren yang sudah diwarnai oleh warna baru itu.²³

Sementara itu pesantren komprehensif merupakan satu kategori pesantren yang berusaha mempertemukan beberapa unsur dari kedua tipologi pesantren terdahulu. Dalam pesantren tipe terakhir ini akan terlihat ciri kedua pondok pesantren yang disebut terdahulu. Misalnya pada satu sisi dengan hadirnya sistem klasikal pada sistem pengajarannya sama seperti pesantren modern dan sekolah-sekolah umum pada lazimnya, sementara di sisi lain dengan tetap menggunakan kitab kuning sebagai batasan kurikulumnya masih sama seperti pondok pesantren tradisional. Selain itu, kurikulum pesantren ini biasanya juga ditambah dengan beberapa mata pelajaran umum yang mempunyai kaitan erat dengan ilmu agama, seperti matematika yang berkaitan dengan ilmu waris, falak, dan sebagainya.²⁴

Saat ini, kecenderungan yang ada justru mengarah pada layanan individual tersebut. Berbagai usaha berinovasi dilakukan justru untuk memberikan layanan individual tersebut, yakni sorogan gaya mutakhir. Dengan metode sorogan yang di perbaharui, metode ini justru mengutamakan tingkat

²²M. Bahri Ghazali, *Pesantren Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: Prasasti, 2003), 32.

²³ Zaini, "Orientasi Pondok Pesantren", 82-83.

²⁴ Ibid, 83.

kematangan dan perhatian serta kecepatan seseorang. Banyak para santri berbeda tingkat pemahamannya, oleh karena itu, pelayanan kepada para santri harus dibedakan.

C. Eksistensi Kaum Santri dalam Sejarah Bangsa

Sulit disangkal bahwa eksistensi pesantren dari masa ke masa telah memberi kontribusi konkrit dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Di era kerajaan Jawa, pesantren menjadi pusat dakwah penyebaran Islam. Di era penjajahan kolonial, pesantren menjadi medan heroisme pergerakan perlawanan rakyat. Di era kemerdekaan, pesantren terlibat dalam perumusan bentuk dan ideologi bangsa serta terlibat dalam revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan, telah memberikan sumbangsih yang *survive* dalam sejarah mewujudkan idealisme pendidikan bangsa yang bukan sekedar meningkatkan kualitas sumber daya *manusia (human resource)* atau aspek intelektualitas *an sich*, melainkan juga lebih *concern* dalam mencetak moralitas dan spiritualitas bangsa yang luhur.²⁵ Sebagai lembaga pendidikan tradisional, pesantren telah menjadi benteng kultural budaya bangsa dari gesekan-gesekan dan pergeseran tata nilai sosial akibat implikasi modernitas.

Pesantren adalah sebuah dunia yang menarik dikaji dan diteliti. Meskipun selama ini banyak peneliti menjadikan pesantren sebagai objek kajian, selalu saja tersedia perspektif tertentu yang belum bisa diungkap.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki kekayaan khazanah pengetahuan sosial yang dapat diteliti dari berbagai aspek keilmuan. Posisi pesantren yang demikian menjadi bukti bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dan masih tetap eksis hingga kini, tetapi juga merupakan entitas sosial yang memiliki pengaruh cukup kuat sekaligus unik dalam sistem politik di Indonesia.

²⁵ M. Dian Nafi, *Praksi Pembelajaran Pesantren* (Yogyakarta: Institute for Training and Development, 2007), 19.

²⁶ Studi tentang pesantren di antaranya adalah Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3S, 1990); Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3S, 1987); Endang Turmudi, *Kiai dan Perselingkupan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2004); Khoirudin, *Politik Kiai* (Yogyakarta: Averroes Press, 2005); dan Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Hal tersebut dapat dilihat dari perhatian yang diberikan kekuatan-kekuatan politik: partai politik atau para politisi yang selalu melakukan kunjungan politik ke pesantren-pesantren yang berpengaruh di berbagai daerah untuk menggalang dukungan politik. Sejak era Reformasi yang ditandai demokratisasi dan keterbukaan sistem politik, sikap politik kaum santri dirasakan semakin menonjol. Abdurrahman Wahid yang juga seorang santri, berhasil menjadi presiden kelima RI. Komunitas pesantren dan para kiai yang memimpin pesantren mengalami euforia politik, sehingga ramai-ramai terlibat dalam politik praktis.

Secara historis, fungsi dasar pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, pesantren juga memiliki pengaruh dan peran politik yang penting di tengah masyarakat tradisional.²⁷ Oleh sebab itu, pesantren selalu berada dalam pusaran arus tarik-menarik kepentingan politik, sehingga tidak sedikit pesantren yang akhirnya melibatkan diri dalam politik. Tingkat intensitas dan bentuk keterlibatan pesantren dalam politik bisa bermacam-macam, baik secara langsung maupun tidak, sebagaimana kita saksikan pada pelaksanaan momen-momen politik yang penting seperti pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (pilpres), atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Jika ditelusuri lebih jauh tentang peranan tokoh pesantren (ulama) dalam mewarnai proses perubahan sosial politik di Indonesia, maka akan tercatat beberapa tokoh penting dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, di antaranya adalah KH. Hasyim Asy'ari. KH. Hasyim Asy'ari merupakan seorang ulama yang terkemuka di zamannya, karena dia adalah pendiri pondok pesantren Tebuireng dan ikut serta mendorong untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan.²⁸ Di sisi lain, dia adalah tokoh penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama yang kelak dalam sejarah Indonesia akan menjadi ormas Islam terbesar dan memainkan peranan yang cukup signifikan dalam berbagai perubahan sosial dan politik di Indonesia.

²⁷ Lihat Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3S, 1987), 13-14.

²⁸ Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKIS, 2002), 15.

D. Nahdhatul Ulama'; Paradigma dan Organisasi Kaum Santri

Santri dan Nahdhatul Ulama (NU) bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi identifikasi satu sama lain. NU merupakan ormas terbesar dalam sejarah Indonesia yang masih eksis dan *survive* sampai sekarang. Meskipun pada saat berdirinya NU, ada beberapa ulama yang menjadi *founding father* dan ikut serta dalam sejarah berdirinya NU, tetapi nama Kiai Hasyim yang sangat menonjol. Dalam catatan Martin van Bruneissen, antropolog Belanda, setidaknya ada 11 pengurus yang hadir pada rapat pembentukan organisasi NU dan 5 di antaranya adalah guru agama yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdullah Faqih, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syansuri, dan Kiai Muhammad Nur. Sementara yang lain memiliki profesi yang berbeda, misalnya 4 di antara mereka adalah tuan tanah, 1 orang adalah pedagang, dan seorang jurnalis percetakan.²⁹

NU yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 di Kertopaten, Surabaya, yang waktu itu dibentuk dengan nama Nahdhatul Oelama³⁰ (ejaan lama), paling tidak menurut sebagian sarjana, merupakan reaksi atas gerakan purifikasi Muhammadiyah terhadap tradisi-tradisi Islam yang diyakini tidak memiliki landasan normative baik dari al-Qur'an maupun hadis. Tradisi-tradisi yang dimaksud seperti upacara *slametan*, *yasinan*, *tablilan*, ziarah kubur dan seterusnya. Hal-hal tersebut dianggap bid'ah yang harus dihilangkan dalam dalam tradisi Islam. Salah satu kritik paling pedas kaum reformis Muhammadiyah terhadap kaum tradisional adalah hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang meninggal dunia. Kaum reformis mengatakan bahwa meninggalnya seseorang berarti menandai akhirnya komunikasi antar manusia dan segala upaya-upaya yang berkaitan dengan pemujaan arwah yang sudah meninggal juga sangat dikutuk oleh kaum reformis. Kondisi ini tentu saja mengancam eksistensi

²⁹ Martin van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 33. Terkait dengan jumlah Kiai yang hadir dalam pertemuan pembentukan NU, tampaknya Greag Fealy menemukan jumlah yang berbeda, ia mencatat 15 Kiai yang hadir, sepuluh orang datang dari Jawa Timur dan Madura, empat dari Jawa Tengah dan satu dari Jawa Barat. Sejumlah muslim awam, atau bukan ulama juga hadir dalam pertemuan itu. Uraian lebih lanjut lihat Greag Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS, 1998), 21.

³⁰ Andree Feillard, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi Bentuk dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 11.

Kiai yang seringkali menjadi pemimpin dalam acara-acara tersebut. Kritik terhadap kelompok tradisional tidak hanya datang dari Muhammadiyah dan SI, tetapi Persis (Persatuan Islam) juga turut serta menghakimi kelompok tradisional dengan mengatakan bahwa mereka melakukan dosa besar dengan mengikuti ulama secara buta atau *bertaqlid*.³¹ Dengan kata lain, gerakan pembaruan yang dipelopori oleh Muhammadiyah dengan SI telah memarginalkan posisi Kiai di tengah masyarakat. Kehadiran NU dalam hal ini menjadi benteng perlawanan kaum tradisional terhadap kaum reformis.

Argumen latar kelahiran NU di atas menurut Bruinessen, tidaklah salah tetapi ia bisa didebat dengan satu pertanyaan, kenapa NU lahir nanti pada tahun 1926, tidak lebih awal lima atau sepuluh tahun padahal Sarikat Islam jauh sebelumnya sudah mengkampanyekan reformasi atau pembaruan dalam tradisi Islam.³² Martin mengatakan, kendatipun kelahiran NU terkait dengan aksi pembaruan, tetapi ia juga terkait dengan dunia Islam internasional pada pertengahan tahun 1920 an, seperti penghapusan jabatan khalifah oleh Kemal at-Taturk, serbuan kaum Wahabi atas Mekkah, serta pencarian model internasionalisme baru.

Didorong oleh semangat untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta rasa kepedulian terhadap pelestarian warisan peradaban, maka Kiai Hasyim bersama para pengasuh pesantren lainnya, membuat delegasi yang dinamai Komite Hijaz. Komite yang diketuai KH. Wahab Hasbullah ini datang ke Saudi Arabia dan meminta Raja Ibnu Saud untuk mengurungkan niatnya. Pada saat yang hampir bersamaan, datang pula tantangan dari berbagai penjuru dunia atas rencana Ibnu Saud, sehingga rencana tersebut digagalkan. Hasilnya, hingga saat ini umat Islam bebas melaksanakan ibadah di Mekah sesuai dengan madzhab masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.³³

³¹ Faisal Ismail, *Islamic Traditionalism in Indonesia: A Study of Nabdhatul Ulama's Early History and Religious Ideology (1926-1950)* (Jakarta: Litbang Agama, 2003), 13.

³² Martin van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*, 22.

³³ www.tebuieng.org. Diakses pada 15 April 2017.

Pada tanggal 16 rajab 1344 H, Hadratus Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari bersama rekan-rekannya di antaranya Kiai Abdul Wahhab Hasbullah, Kiai Bashri Syansuri, dan Kiai-Kiai besar Jawa lainnya mendirikan organisasi Nahdhatul Ulama' (NU).³⁴ Organisasi ini adalah organisasi keagamaan yang menyerukan kepada umat Islam supaya berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah serta menjauhi kesesatan dan *bid'ah*,³⁵ dan menggerakkan mereka untuk berpartisipasi dalam jihad menegakkan kalimatullah.³⁶

Peran Kiai Hasyim, sebagai pimpinan pondok pesantren Tebuireng, dalam hal ini sangatlah besar dalam pembentukan Nahdhatul Ulama. Ia dikenal sangat kharismatik di kalangan Kiai-Kiai di Jawa pada waktu itu. Faktor inilah yang membuat NU dengan begitu mudah diterima oleh masyarakat. Meskipun demikian, adalah Kiai Wahab Hasbullah yang menginisiasi ide pembentukan NU, ia adalah organisatoris, penggerak di balik berdirinya NU.³⁷ Ia ingin menunjukkan bahwa NU lebih dari sekedar mempertahankan tradisi sendiri. NU lebih dari sekedar usaha mempertahankan tradisi dari serangan kaum modernis dan reformis.

Dengan berdirinya NU, pesantren berusaha membangkitkan ulama' dan semangat untuk kembali kepada ajaran-ajaran *Ahl al-Sunnah wa al Jama'ah*. Ulama' adalah 'mesin' dakwah Islam. Oleh sebab itu ketika terjadi krisis, ulama' harus dibangkitkan, dibenahi keilmuannya dan diatur strategi perjuangannya. NU sebagai organisasi kaum santri mengikuti madzhab Syafi'i dalam bidang fikih,

³⁴ Kiai M.Hasyim Asy'ari dalam mendirikan Nahdhatul Ulama' menyusun 40 hadis sebagai dasar-dasar organisasi tersebut (*Arba'ina Hadithan Tata'allaqu Bi Mabadi'i Jam'iyah Nahdlatul Ulama*). Lihat KH. Hasyim Asy'ari, at *Tibyan* (Jombang: Maktabah Turst Islami, tt), 36-40.

³⁵ *Bid'ah* adalah perkara baru yang dibuat dalam masalah agama. Di dalam kitab *risalah ablus sunnah wal jamaah*, Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang *bid'ah* dan dosa orang yang menyeru kepada kesesatan dengan penjelasan yang jelas berdasarkan dari penjelasan para ulama besar yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

³⁶ NU (Nahdlatul Ulama) yang diketuai Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari terbukti turut andil dalam *jihad fi>sabilillah* melawan penjajah era kemerdekaan bahkan beliau orang yang menyerukan resolusi jihad. Bung Tomo senantiasa meminta fatwa dan arahan dari beliau sebelum menyerang atau menghadapi musuh. beliau juga memanggil para ulama dari berbagai wilayah Jawa untuk datang ke Surabaya dalam rangka *jihad fi>sabilillah* melawan tentara NICA (Netherland Indian Civil Administration) dan Inggris atau yang dikenal dengan pertempuran 10 November 1945. Lihat Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah* (Jakarta: Salamadani, 2010). Lihat pula M.Hasyim Asy'ari, *Adabul 'Alim wa al-Muta'alim* (Jombang: Maktabah Turath Islami 1415H), 3.

³⁷ Martin van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*, 29.

dalam bidang teologi mengikut Abul Hasan al-Asy'ari dan Maturidi. Madzhab dan teologi ini mayoritas dianut umat Islam Nusantara.

NU menyeru kepada umat Islam untuk bersungguh-sungguh berjihad melawan akidah yang rusak dan pengkhina al-Qur'an. Untuk itu, NU menjaga keutuhan umat Islam dan tidak fanatik buta kepada perkara *furu'*³⁸ NU menyeru untuk meninggalkan fanatisme buta kepada satu madzhab. Sebaliknya ia mewajibkan untuk membela agama Islam, berusaha keras menolak orang yang menghina al-Qur'an, dan sifat-sifat Allah SWT, dan memerangi pengikut ilmu-ilmu batil dan akidah yang rusak. Usaha dalam bentuk ini wajib hukumnya.

Menurut KH.M.Hasyim Asy'ari, fanatisme terhadap perkara *furu'* itu tidak diperkenankan oleh Allah SWT, tidak diridloi oleh Rasulullah SAW. Selama mengikuti salah satu madzhab yang empat, maka termasuk *Ahl al-Sunnah wal Jama'ah*. Jika berdakwah dengan orang yang berbeda madzhab fikihnya, ia melarang untuk bertindak keras dan kasar, tapi harus dengan cara yang lembut. Sebaliknya, orang-orang yang menyalahi aturan *qat'i* tidak boleh didiamkan.³⁹ Semuanya harus dikembalikan kepada al-Qur'an, **Hadith**, dan pendapat para ulama terdahulu. Inilah sikap adil, yakni menempatkan perkara pada koridor **shari'ah** yang sebenarnya.

Sejak NU didirikan pertama kali pada 31 Januari 1926, NU memiliki rambu-rambu peringatan terhadap paham *nyeleneh*. Peringatan tersebut dikeluarkan agar warga NU ke depan hati-hati menyikapi fenomena perpecahan akidah. Pada sekitar tahun 1330 H terjadi infiltrasi beragam ajaran dan tokoh-tokoh yang membawa pemikiran yang tidak sesuai dengan *mainstream* Muslim Jawa waktu, yakni berakidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.⁴⁰

NU berdiri bertujuan memperbaiki keislaman kaum Muslim nusantara dengan cara membangkitkan kesadaran ulama-ulama' Nusantara akan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Diharapkan dengan wadah organisasi ini, para ulama' bersatu padu membela akidah Islam. KH.M.Hasyim Asy'ari, merupakan Rais

³⁸ M. Hasyim Asy'ari, *al-Tibyan fi al-Nahyi 'an Muqatha'ati al-Arham wa al-'Aqarib wa al-Ikhwān* (Jombang: Maktabah al-Turath al-Islami> tt), 32.

³⁹ Ibid., 33.

⁴⁰ M. Hasyim 'Asy'ari, *Risalah Ahl al-Sunnah wal Jama'ah* (Jombang: Maktabah al-Turath al-Islami> tt), 9.

Akbar Nahdlatul Ulama'. Beliau memberikan gambaran tentang *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagaimana ditegaskan dalam *al-qanun al-asasi* bahwa faham *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* versi Nahdlatul Ulama' yaitu mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Manshur al-Maturidi secara teologis, mengikuti salah satu empat madzhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) secara fiqhiyah, dan bertashawuf sebagaimana yang difahami oleh Imam al-Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab *Qanun Asasi* (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab *I'tiqad Ahl al-Sunnah wa a-Jama'ah*. Kedua kitab tersebut, kemudian diejawantahkan dalam *Khittab* NU, yang dijadikan dasar dan rujukan sebagai warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. Khusus Untuk membentengi keyakinan warga NU agar tidak terkontaminasi oleh paham-paham sesat yang dikampanyekan oleh kalangan modernis, KH Hasyim Asy'ari menulis kitab *risalah ahl al-sunah wa al-jama'ah* yang secara khusus menjelaskan soal bid'ah dan sunah. Sikap lentur NU sebagai titik pertemuan pemahaman akidah, fikih, dan tasawuf versi *ahl sunnah wa al-jama'ah* telah berhasil memproduksi pemikiran keagamaan yang fleksibel, mapan, dan mudah diamalkan pengikutnya.⁴¹

Dalam perkembangannya selanjutnya, para ulama' dan santri di Indonesia menganggap bahwa Aswaja yang diajarkan oleh KH Hasyim Asy'ari sebagai upaya pembakuan atau menginstitusikan prinsip-prinsip *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran) dan *tawazun* (seimbang) serta *ta'addul* (keadilan). Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan dasar dalam mengimplimentasikan Aswaja.

E. Resolusi Jihad; Kepemimpinan dan Perjuangan Santri dalam Mempertahankan NKRI

⁴¹ Marwan Ja'far, *Ahl al-ssunnah Wa al-Jama'ah; Telaah Historis dan Kontekstual* (Yogyakarta: LKiS, 2010), Cet. I, 81.

Sejarah kemerdekaan nasional Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah rangkaian perjalanan panjang yang dipenuhi dengan aksi jihad para syuhada. Umat Islam sudah eksis membangun peradaban jauh sebelum para penjajah datang ke tanah air. Salah satu fragmen penting dari rangkaian perjalanan panjang tersebut adalah Resolusi Jihad. Meskipun buku sejarah nasional Indonesia tidak mencantumkan catatan penting mengenai resolusi jihad sebagai konteks peperangan, namun arti pentingnya akhirnya ditandai secara nasional yang senantiasa identik dengan Hari Pahlawan 10 November. Pertempuran dahsyat itu diinspirasi dan digerakkan oleh Resolusi Jihad KH. Hasyim Asyari.

NU sebagai organisasi kaum santri merupakan gerakan yang mengarahkan perjuangannya kepada dua sasaran sekaligus.⁴² *Pertama*, sebagaimana tampak dalam uraian dimuka, NU mengarahkan perjuangannya pada upaya memperkuat dan mengembangkan amal ibadah dan akidah yang mendapat serangan-serangan kaum “pembaharu”. Sementara di dalam dirinya, NU secara aktif mengembangkan persepsi keagamaannya yang baru terutama dalam kaitan dengan amal-amal sosial, pendidikan dan ekonomi. Perubahan perubahan di lingkungan NU, bukan tidak terjadi. Tetapi, khas NU, perubahan yang dilakukan selalu dilaksanakan dengan kearifan pada sistem budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.⁴³

Kedua, perjuangan NU juga diarahkan kepada kolonialisme Belanda. Pola yang dipakai dalam perjuangan menghadapi Belanda tampak jelas, banyak bersifat kultural. Dalam kaitan ini, NU misalnya mengeluarkan kata putus yang mengharamkan pantalon dan dasi. Atau disegi yang lain menolak sistem pendidikan model Belanda dan sebagainya. Bagi merekayang ingin kembali pada teks al-Qur’an dan al-Hadits, sulit menemukan landasan hukum haram atas pantalon dan dasi. Tetapi bagi mereka yang memahami metode pengambilan hukum (*istinbath*) di kalangan ulama NU, maka sikap itu bisa dipahami. Ketika NU memakai hadits; *man tasyabbahâ bi qaumin fahuwa minh* (siapa yang

⁴² Slamet Effendi Yusuf dkk., *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*, edisi ke-1 (Jakarta: Rajawali, 1983), 34.

⁴³ *Ibid.*, 34-35.

menyerupai suatu golongan, tentu dia merupakan bagian mereka), orang harus memahami siapa Belanda dalam pandangan kaum muslimin. Perlawanan kultural terhadap pemerintah kolonial Belanda, seperti akan diuraikan kemudian, berhasil membentuk kiai dan santri-santrinya menjadi lapisan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat anti penjajah. Pada gilirannya, sikap anti penjajah ini memberikan sumbangan yang sangat besar pada perjuangan menuju Indonesia.

Demikian, perjuangan NU yang mengambil bentuk kultural dalam menghadapi penjajah Belanda, pada akhirnya menjadi watak dasar yang membedakan NU dengan gerakan-gerakan anti penjajah yang lain. Apalagi dibandingkan dengan SI yang sangat diwarnai oleh watak politiknya. Namun demikian, ketika perjuangan politik melawan Belanda makin banyak melibatkan golongan-golongan di Indonesia. Kontak-kontak secara langsung antara tokoh-tokoh NU dengan berbagai kalangan, tidak bisa dihindari. Apalagi kemudian NU harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan Belanda secara terus-menerus dipakai untuk mengganggu hal-hal yang dipandang sebagai prinsip dari kehidupan bangsa dan agama. Dalam hubungan ini kita melihat NU yang menentang Ordonansi Guru, Ordonansi Pencatatan Perkawinan 1937 (sejenis UU perkawinan) menolak milisi untuk menghadapi Jepang, ikut menuntut Indonesia berparlemen, penolakan kepada usaha penacabutan artikel 177 Indische Staatregeling yang mengandung semangat diskriminasi golongan dan agama, dan lain-lain.⁴⁴

Sikap-sikap itu mendatangkan kesadaran baru, bahwa kekuasaan Belanda secara terus-menerus dihadapkan kepada Islam. Untuk mengakhiri kekuasaan yang seperti ini, bagaimanapun pemerintahan Belanda harus diakhiri. Dan untuk itu bangsa Indonesia harus merdeka. Mulai saat itu secara luas, intensitas keterlibatan NU kepada perjuangan politik makin kelihatan. Kebijakan Belanda yang merusak syari'at Islam membawa hikmah tersendiri, ketika NU bersama Muhammadiyah bersama-sama membentuk **Majlis al-Islam A'la** Indonesia (Majlis Tertinggi Islam Indonesia), yang disingkat MIAI, yang berdiri pada tanggal 21 September 1937. NU secara resmi masuk sebagai organisasi

⁴⁴ Ibid., 35.

anggota MIAI dalam Kongres Al-Islam yang diselenggarakan pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938, walaupun tokoh utamanya ikut mensponsori pendiriannya.⁴⁵

Sikap anti penjajah NU menyebabkan antisipasinya terhadap perkembangan keadaan yang menyangkut Republik Indonesia demikian cepat. Melihat ancaman terhadap negara yang sudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya, sudah mempunyai konstitusinya sendiri (UUD 1945, di mana NU merasa mempunyai andil dalam proses-proses perumusannya) mendorong organisasi ini pada tanggal 22 Oktober 1945 mengeluarkan sebuah Resolusi Jihad.

Sebelumnya NU mengirim surat resmi kepada pemerintah di antaranya berbunyi:

“Memohon dengan sangat kepada pemerintah Indonesia supaya menentukan sikap dan tindakan yang nyataserta sepadan terhadap tiap-tiap usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap Belanda dan kaki tangannya. Supaya pemerintah melanjutkan perjuangan yang bersifat “sabilillah” untuk tegaknya Negara Republik Indonesia yang merdeka dan beragama Islam.”⁴⁶

Pernyataan yang diputuskan dalam suatu rapat para konsul NU se-Jawa itu berbunyi:⁴⁷ (1) Kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. (2) Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah, wajib dibela dan diselamatkan. (2) Musuh Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang dengan membonceng tugas-tugas tentara sekutu (Inggris) dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. (3) Umat Islam terutama Nahdlatul Ulama wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. (4) Kewajiban tersebut adalah suatu jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap orang Islam (*fardlu ‘ain*) yang berada pada jarak radius 94 km (jarak di mana umat Islam diperkenankan sembahyang jama’dan qasar). Adapun mereka

⁴⁵ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik, edisi ke-2* (Jakarta: Gramedia, 1998), 133.

⁴⁶ Soleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswab*, edisi ke-2 (Surabaya: Khalista, 2008), 95.

⁴⁷ Yusuf, *Dinamika Kaum Santri*, 38.

yang berada diluar jarak tersebut berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak radius 94 km tersebut.

Resolusi Jihad tersebut akhirnya mampu membangkitkan semangat santri dan masyarakat Surabaya dan sekitarnya untuk bertempur habis-habisan melawan penjajah. Dengan semangat takbir Allāhu Akbar yang dikumandangkan oleh Bung Tomo, maka terjadilah perang rakyat yang heroik pada 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian dikenal dengan Hari Pahlawan.⁴⁸ Dengan demikian, maka mempertahankan eksistensi NKRI dari segala hal yang mengancamnya wajib dilakukan oleh umat Islam, bukan semata-mata atas nama nasionalisme, namun untuk keberlangsungan kehidupan umat Islam yang berdiam di negara tersebut.

F. Pesantren, Nahdhatul Ulama dan Politik Kebangsaan Kaum Santri

Sebagaimana telah diurai sebelumnya, santri sebagai pemuda pesantren menjadi entitas yang tak terpisahkan dari sejarah Indonesia. NU – yang merupakan organisasi pemuda pesantren - menjadi organisasi yang besar dan disegani oleh kelompok modernis maupun pihak Belanda. Sesuai dengan visi dan misi NU, bahwa NU tetap konsisten dalam mengembangkan sosial keagamaan, NU terus berbenah diri dengan cara membangun sayap-sayap yang nantinya menjadi corong dalam pengembangan organisasi NU. Tahun 1929, tiga tahun setelah berdirinya NU, lembaga al-Ma'arif didirikan yang concern pada pengembangan institusi pendidikan di bawah naungan NU.

Menurut Greg Fealy, kiprah NU yang paling berhasil dalam kurun waktu 1920-1930 adalah bidang pendidikan. Banyak cabang besar NU yang mendirikan madrasah dan menambah jumlah pesantren. Metode pengajaran dan kurikulumnya juga beragam, tetapi sebagian besar masihmengkombinasikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Sistem pangajarannya juga sudah mirip dengan sekolah-sekolah modernis. Meskipun output yang dihasilkan masih kalah dengan sekolah-sekolah modern.⁴⁹

⁴⁸ Fadeli dan Subhan, *Antologi NU*, 95.

⁴⁹ Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, 42.

Dalam bidang ekonomi, NU melanjutkan misi dari Nahdhatul Tujjar (kebangkitan pedagang), salah satu organisasi yang menjadi embrio berdirinya NU, dengan cara mendirikan koperasi pada 1937 yang mewadahi praktek dagang bagi kalangan petani, buruh yang kemudian dikenal dengan nama Shirkah Mu'awanah yang menjual gula, sabun, batik, hasil laut dan rokok. Hanya saja, karena sebagian besar dari anggota NU berasal dari ekonomi lemah, bukan kumpulan pemilik modal sebagaimana halnya Syarikat Islam, maka perputaran ekonominya juga menjadi kecil. Maka tidak heran, kalau NU pada masa awalnya tidak memiliki basis dana yang kuat karena pemasukan dari iuran anggotanya juga sangat kecil.⁵⁰

NU dalam hubungannya dengan aspek gender, selama 12 tahun pertama, keanggotaan NU hanya untuk pria. Wanita boleh saja datang pada pertemuanpertemuan NU tetapi tidak memiliki suara dan diberikan tabir. Dengan kata lain, wanita masih dalam posisi inferior dihadapan laki-laki. Keterbukaan kepada partisipasi politik perempuan di NU terbuka ketika para wanita mengancam untuk bergabung di Aisyiah, organisasi perempuan Muhammadiyah. Ancaman para wanita tersebut, yang sebagian besar dari kalangan berpengaruh terutama dari keluarga Kiai, ternyata berhasil. Pada tahun 1938, akhirnya wanita diperbolehkan menjadi anggota, hanya saja belum diberikan hak untuk menduduki jabatan. Perjuangan para wanita tersebut terus berlanjut untuk diberikan badan otonom yang bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Besar. Akhirnya pada tahun 1946, satu tahun sebelum meninggalnya Kiai Hasyim, maka dibentuklah sebuah divisi wanita yang diberi otonomi bernama Muslimat NU.⁵¹

Prestasi-prestasi di atas tentu saja tidak boleh dilepaskan dari peran Kiai Hasyim yang waktu itu duduk sebagai pimpinan NU. Keterbukaannya kepada pendapat orang lain serta dedikasi dan integritasnya dalam membangun umat, terutama kelompok yang dicap tradisional, telah memberikah ghirah tersendiri terhadap NU sebagai representasi kelompok tradisional. Hanya saja, NU dalam hubungannya dengan aspek politik mengalami pasang surut sebagaimana pasang

⁵⁰ Ibid., 42-43.

⁵¹ Ibid., 45.

surutnya hubungan antara kelompok tradisional dan kelompok modernis. Kondisi ini kemudian memunculkan tuduhan bahwa NU pada awalnya cenderung akomodatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tuduhan ini muncul ketika anggaran dasar NU sama sekali tidak menyebutkan tujuan didirikannya NU untuk melawan penjajah. Bahkan dalam muktamarnya pada tahun 1938, NU menyatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda adalah *Daar al-Islam* artinya negeri yang dapat diterima umat Islam. Alasan NU pada waktu itu adalah penduduk muslim dapat melaksanakan syariat, syariat dijalankan oleh para pegawai yang juga muslim dan negeri ini dulu dikuasai oleh raja-raja muslim.⁵²

Akan tetapi, sikap seperti ini tidak mengindikasikan pemihakan kepada penjajah. Setahun sebelum NU dilahirkan, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, bahwa kemerdekaan adalah tujuan utama karena Islam tidak akan leluasa sebelum kita merdeka. Tindakan anti penjajah juga tampak pada Pesantren Tebuireng, dimana Kiai Hasyim menjadi pimpinannya, pada setiap hari kamis, santri menyanyikan lagu kebangsaan setelah mata pelajaran berakhir. Demikian juga buku-buku yang dilarang oleh Pemerintah Belanda beredar bebas di Pesantren. Bahkan santri dilarang memakai topi, dasi dan sepatu kalau itu dijadikan symbol keangkuhan pemerintah Belanda.³⁶

Sikap politik Kiai Hasyim yang cenderung akomodatif terhadap penguasa yang waktu pemerintah Hindia Belanda sebenarnya berasal dari doktrin politik sunni sebagaimana yang dikembangkan oleh al-Mawardi dan al-Ghazali. Doktrin ini muncul mengingat kondisi umat Islam pada waktu itu mengalami kemunduran dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan. Prinsip inilah kemudian yang diadopsi oleh Kiai Hasyim dengan cara bermitra dengan pemerintah baik yang muslim maupun yang non muslim.⁵³

Sembari mendukung penguasa pada waktu itu, Kiai Hasyim tetap menyerukan pentingnya persatuan umat Islam baik dari kelompok tradisional maupun dari kelompok modern. Ajakan persatuan ini disampaikan dalam berbagai forum, dan puncaknya ketika tampil dalam muktamar NU yang ke 11 di Banjarmasin. Kiai Hasyim menyerukan perdamaian antara kaum tradisional dan

⁵² Feillard, *NU vis a vis Negara*, 16.

⁵³ Khuluq, *Fajar Kebangsaan Ulama'*, 61.

kaum modernis. Pidato ini kemudian mencatat sejarah baru dalam dunia politik Islam pada waktu itu dimana tensi antara tradisional dan modernis meningkat. Pidato ini bahkan mendapat pujian dari tokoh modernis Buya Hamka dengan mengatakan bahwa pidato ini tidak saja penting bagi kalangan NU bahkan untuk seluruh umat Islam baik yang hidup pada waktu itu maupun orang-orang setelah meninggalnya Kiai Hasyim.⁵⁴

Dalam konteks politik, Kiai Hasyim juga prihatin dengan kondisi politik umat Islam pada waktu itu. Ia sedih dengan banyaknya orang menjadikan Islam sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Agama dijadikan tameng untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Ia selanjutnya membandingkan dengan kondisi politik ketika itu dengan masa pemertintahan awal Islam. Kiai Hasyim mencontohkan bagaimana Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar mengarah kepada tiga tujuan pokok; (1) Memberi persamaan bagi setiap muslim. (2) Melayani kepentingan rakyat dengan jalan perundingan. (3) Menjaga keadilan. Ia menyatakan lebih lanjut bahwa bentuk pemerintahan Islam tidak ditentukan. Ketika yang kita hormati Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan pesan apapun mengenai bagaimana memilih kepala Negara. Jadi, pemilihan kepala negara dan banyak hal lagi mengenai kenegaraan tidak ditentukan, tidak terikat untuk mengikuti sistem. Semua sistem dapat dilaksanakan pada masyarakat Islam pada setiap tempat.⁵⁵

Meskipun dicap sebagai kelompok tradisional, tetapi pikiran-pikiran kaum santri sudah modern. Gagasan NU yang dalam perjalanan politiknya tidak pernah ingin berjuang untuk mendirikan negara Islam. Dalam konteks politik praktis, pemuda pesantren mulai terlibat dalam sebuah konfederasi umat Islam pada waktu itu yang kemudian dikenal dengan MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia). Keterlibatan NU sebagai organisasi pemuda pesantren merupakan langkah pertama dalam menentukan posisi terhadap penjajahan Belanda menjelang perang dunia II. Tidak hanya itu, Kiai Hasyim mendorong pemuda pesantren seperti Mahfud Shiddiq dan Wahid Hasyim (putra Kiai Hasyim) untuk ikut bergabung di GAPI (Gabungan Politik Indonesia). Mereka mewakini NU di

⁵⁴ Ibid., 62.

⁵⁵ Ibid., 64.

MIAI. Setelah MIAI bubar, Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Organisasi ini beranggotakan anggota Muhammadiyah dan NU. Organisasi ini dibentuk oleh Pemerintah Jepang. Dalam Masyumi, Kiai Hasyim sebagai Presidennya sementara puteranya Wahid Hasyim dan Mas Mansur (Muhammadiyah) sebagai wakil Presidennya yang berkedudukan di Jakarta. Kiai Wahab dan Ki Bagus Hadikusumo, masing-masing ketua NU dan Muhammadiyah menjadi penasehat eksekutif Masyumi.⁵⁶

Kiprah pemuda pesantren tidak berhenti sampai di situ, organisasi kaum santri ini juga intens pada persiapan kemerdekaan. Pemuda pesantren – melalui NU - bahkan turut andil atas terpilihnya Soekarno sebagai calon Presiden pada waktu itu mengalahkan Muhammad Hatta dengan perbandingan 9 banding 1. Dan puncak perlawanan kaum santri adalah ketika Belanda kembali lagi datang menjajah Indonesia. Kemudian dikeluarkanlah fatwa yang kemudian dikenal dengan resolusi jihad yang dikeluarkan pada bulan Oktober 1945 yang isinya antara lain bahwa Kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan.⁵⁷ Fatwa ini tentu saja mematahkan pendapat yang mengatakan bahwa NU tidak pernah kooperatif terhadap penjajah. Kalaupun dia bermitra, itu adalah bagian dari strategi melawan penjajah. Demikianlah sekelumit peran, perjuangan pemuda pesantren. Begitu banyak prestasi yang telah diukir santri sebagai pemuda dalam lembaran sejarah bangsa. Lika-liku perjuangannya tertanam dalam sanubari generasi-generasi pesantren hingga saat ini.

G. Penutup

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis menguraikan simpulan yang menjadi inti pembahsan. Dari deskripsi-deskripsi di atas, penulis memberi gambaran bahwa santri merupakan pemuda pesantren yang peran dan kontribusinya signifikan bagi Republik ini. Dalam sejarah, santri ikut serta mendorong untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Di sisi lain, santri adalah entitas penting dalam proses berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) yang kelak

⁵⁶ Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa*, 49. Namun dalam perkembangannya, sepeninggal Kiai Hasyim, NU kemudian keluar dari Masyumi pada tahun 1952 akibat perbedaan prinsip.

⁵⁷ Muhammad Rifai, *K.H.Hasyim Asy'ari: Biografi Singkat 1871-1947* (Jogyakarta: Garasi, 2009), 74.

dalam sejarah Indonesia akan menjadi ormas Islam terbesar dan memainkan peranan penting dalam berbagai perubahan sosial dan politik Nasional.

Eksistensi pemuda pesantren dari masa ke masa telah memberi kontribusi konkrit dalam perjalanan sejarah bangsa. Di era kerajaan Jawa, pesantren menjadi pusat dakwah penyebaran Islam. Di era penjajahan kolonial, pesantren menjadi medan heroisme pergerakan perlawanan rakyat. Di era kemerdekaan, pesantren terlibat dalam perumusan bentuk dan ideologi bangsa serta terlibat dalam revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan. Pesantren memiliki kekayaan khazanah pengetahuan sosial yang dapat diteliti dari berbagai aspek keilmuan. Posisi pesantren yang demikian menjadi bukti bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dan masih tetap eksis hingga kini, tetapi juga merupakan entitas sosial yang memiliki pengaruh cukup kuat sekaligus unik dalam sistem politik di Indonesia.

H. Daftar Pustaka

- Arifin, Imron. *Kepimpinan Kiai Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng*. Malang: Kalimasyahadah Press, 1993.
- Asy'ari, M. Hasyim. *Adab al'Alim wa al-Muta'allim*. Jombang: Maktabah al-Turath al-Islami, 1415 H.
- _____. *Al-Qaun Al-Asasi> Risalah Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*, terjemah oleh Zainul Hakim. Jember: Darus Sholah, 2006.
- _____. *al-Tibyan fi>al-Nahyi>'an Muqatha'ati al-Arham wa al-Aqrib wa al-Ikhwan*. Jombang: Maktabah al-Turath al-Islami> tt.
- _____. *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Jombang: Maktabah al-Turath al-Islami> tt.
- Azra, Azyumardi. *Esai-Esai Intelektual Muslim Pendidikan Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Bruinessen, Martin van. *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Dauly, Haedar Putra. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3S, Jakarta, 1983.
- Fadeli, Soleiman., Subhan, Mohammad. *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*, edisi ke-2. Surabaya: Khalista, 2008.
- Fananie, Husnan Bay. *Modernism in Islamic Education in Indonesia and India ; a Case Study of The Pondok Pesantren Modern Gontor and Algarh*, Thesis no Phublished. Nedherlad: Leiden University, 1998.
- Fealy, Greag. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS, 1998.
- Feillard, Andree. *NU Vis a vis Negara: Pencarian Isi Bentuk dan Makna*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Ghazali, M Bahri. *Pesantren Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Prasasti, 2003.
- Haidar, M. Ali. *Nabhdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik, edisi ke-2*. Jakarta: Gramedia, 1998.
- Hamid, Abu. *Sistem Pesantren Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Fakultas Sastra UNHAS, 1978.
- Horikoshi, Hiroko. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3S, 1987.
- Ismail, Faisal. *Islamic Traditionalism in Indonesia: A Study of Nabhdhatul Ulama's Early History and Religious Ideology (1926-1950)*. Jakarta: Litbang Agama, 2003.
- Ja'far, Marwan. *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah; Telaah Historis dan Kontekstual*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Khoirudin. *Politik Kiai*. Yogyakarta: Averroes Press, 2005.
- Khuluq, Lathiful. *Fajar Kebangunan Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama*, 61.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Nalar Spiritual Pendidikan, Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Nafi, M. Dian. *Praksi Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: Institute for Training and Development, 2007.
- Patoni, Ahmad. *Peran Kiai Pesantren dalam Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Rifai, Muhammad. *K.H.Hasyim Asy'ari: Biografi Singkat 1871-1947*. Jogyakarta: Garasi, 2009.

- Suprayogo, Imam. *Pendidikan Berparadigma Al-Qur'an*. Malang: Aditya Media Bekerjasama Dengan UIN Malang Press, 2004.
- Turmudi, Endang. *Kiai dan Perselingkuban Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Wahid, Marzuki. *Pesantren Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Yusuf, Slamet Effendi. *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Zaini, A. Wahid. "Orientasi Pondok Pesantren Tradisional Dalam Masyarakat Indonesia", dalam *Tarekat, Pesantren, dan Budaya Lokal*, ed. M. Nadim Zuhdi et. al. Surabaya : Sunan Ampel Press, 1999.